

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) merupakan salah satu sarana upaya kesehatan dari pemerintah untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan perorangan. Menurut Permekes RI No 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat, puskesmas adalah penyelenggara upaya kesehatan yang mengutamakan kegiatan promotif dan preventif pada pasien. Mengacu pada upaya kesehatan tersebut maka puskesmas perlu memberi perhatian pada tahap pengelolaan obat. Ketersediaan alat, obat, bahan medis habis pakai, dan fasilitas kesehatan lainnya di puskesmas, menjadi salah satu faktor yang menentukan pemenuhan aspek sarana dan prasarana yang memadai. Dalam hal ini, seluruh sumber daya yang tersedia akan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan dan program kerja puskesmas. Oleh karena itu diperlukan kegiatan pengelolaan obat yang dilakukan secara terstruktur dan terus menerus (Fathiyah Rahma, 2018).

Pengelolaan obat merupakan salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian, yang dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi (Permenkes, 2016). Oleh karena itu, kinerja pengelola obat sangat menentukan keberhasilan dalam pengelolaan obat di puskesmas. Sehingga obat-obatan yang tidak dapat dipakai kembali harus dimusnahkan. Dengan pemusnahan obat ini, berarti negara telah membuang uang anggaran dalam penyediaan obat-obat untuk daerah. Tahap penyimpanan merupakan bagian dari pengelolaan obat yang penting dalam memelihara mutu obat-obatan, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga kelangsungan persediaan, memudahkan pencarian dan pengawasan, mengoptimalkan persediaan, memberikan informasi kebutuhan obat yang akan datang, serta mengurangi resiko kerusakan dan kehilangan.

Berdasarkan hasil penelitian Chaira dkk (2016), tentang evaluasi pengelolaan obat pada Puskesmas di Kota Pariaman belum sesuai. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap pengelolaan obat pada 7 puskesmas di Kota Pariaman dengan menggunakan indikator perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan serta pencatatan dan pelaporan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan obat pada puskesmas di Kota Pariaman belum baik karena dari hasil penghitungan, tidak semua indikator mencapai hasil sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2018) tentang perencanaan dan pengadaan obat di Puskesmas X berdasarkan permenkes nomor 74 tahun 2016 sudah sesuai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan obat di Puskesmas X terdapat 2 macam sumber pembiayaan obat yaitu melalui APBD dan JKN. Perencanaan obat yang bersumber dari dana APBD dilakukan melalui penyusunan laporan kebutuhan obat yang dibuat setiap tahun. Perencanaan obat berasal dari pembiayaan JKN dilakukan menggunakan dokumen RKA yang dibuat pada awal tahun berdasarkan jumlah kebutuhan. Mekanisme pengadaan obat dilakukan melalui pemesanan dalam *e-catalogue* sesuai dengan kebutuhan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan perencanaan dan pengadaan obat di Puskesmas X sudah sesuai dengan Permenkes Nomor 74 Tahun 2016.

Puskesmas Kabila merupakan salah satu Puskesmas yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti terdapat 3 masalah pengelolaan obat di Puskesmas Kabila kabupaten Bone Bolango yaitu pada tahap penyimpanan, pemusnahan dan administrasi. Pada tahap penyimpanan masalah yang terjadi yaitu penyimpanan yang tidak sesuai membuat obat kadaluarsa sehingga dapat merugikan Puskesmas oleh karena itu dalam pemilihan sistem penyimpanan harus dipilih dan disesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga pelayanan obat dapat dilaksanakan secara tepat. Pada tahap pemusnahan Puskesmas Kabila belum melakukan tahapan pemusnahan ini dikarenakan biaya yang dibutuhkan banyak, proses panjang dan lama. Sedangkan pada tahap administrasi yang menjadi masalah adalah perekapan resep psikotropik dimana

pada perekapan resep masih ditemukan resep psikotropik yang tidak diberi penandaan.

Berdasarkan latar belakang ini peneliti ingin mengetahui evaluasi pengelolaan obat di Puskesmas Kabila Kabupaten Bone Bolango berdasarkan peraturan menteri kesehatan RI No. 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Evaluasi terhadap proses pengelolaan obat harus dilakukan karena ketidaksesuaian dan ketidaklancaran pengelolaan obat akan memberi dampak negatif, bagi kegiatan pelayanan kefarmasian dalam penyediaan pelayanan kesehatan. pengelolaan obat di Puskesmas yang baik sangat menentukan keberhasilan manajemen Puskesmas secara keseluruhan untuk menghindari perhitungan kebutuhan obat. Pentingnya pengelolaan obat sendiri adalah untuk menjamin tercapainya ketepatan jumlah dan jenis obat dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia seperti tenaga kefarmasian, dana, sarana, dan perangkat lunak (metode dan data tata laksana) dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan di berbagai tingkat unit kerja. karena mengingat pentingnya pengelolaan obat untuk meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas maka perlu dilakukan evaluasi pengelolaan obat mulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, administrasi, pemantauan dan evaluasi.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana manajemen pengelolaan obat di Puskesmas Kabila Kabupaten Bone Bolango?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui manajemen pengelolaan obat di Puskesmas Kabila Kabupaten Bone Bolango

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu

1. Untuk mengetahui perencanaan obat di Puskesmas Kabila Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016.

2. Untuk mengetahui permintaan obat di Puskesmas Kabila Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016.
3. Untuk mengetahui penerimaan obat di Puskesmas Kabila Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016.
4. Untuk mengetahui penyimpanan obat di Puskesmas Kabila Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016.
5. Untuk mengetahui pendistribusian obat di Puskesmas Kabila Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016.
6. Untuk mengetahui pemusnahan dan penarikan obat di Puskesmas Kabila Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016.
7. Untuk mengetahui pengendalian obat di Puskesmas Kabila Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016.
8. Untuk mengetahui administrasi obat di Puskesmas Kabila Kabupaten Bone Bolango Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016.
9. Untuk mengetahui pemantauan dan evaluasi pengelolaan obat di Puskesmas Kabila Kabupaten Bone Bolango Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Mendapatkan pengalaman dan keterampilan baru tentang pengelolaan obat di puskesmas. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini juga diharapkan juga dapat menambah ilmu pengetahuan pengelolaan obat di Puskesmas Kabila Kabupaten Bone Bolango

1.4.2 Bagi Puskesmas

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan Puskesmas Kabila dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan serta dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu evaluasi dan masukan bagi manajemen Puskesmas Kabila

1.4.3 Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi, informasi serta dapat meningkatkan ilmu pengetahuan bagi para pelajar di institusi pendidikan mengenai pengelolaan obat